

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Amin Widjaja Tunggal. *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. 2014.
- Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2003.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008.
- Edi Nasution. *Resensi Buku Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012.
- Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing. 2010
- Gerson W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1977.
- H. Juni Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia. 2012.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1985.
- Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.

- Indra Darmawan. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group. 2010.
- Marwan Efendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Miriam Buiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1989.
- Muktie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing. 2005.
- N.H.T Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Philips Darwin. *Money Lundering : Memahami Dengan Tepat dan Pemberantasannya*. Jakarta: Sinar ilmu. 2012.
- R. Soesilo. *Teknik dan Taktik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea. 1974.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafindo Persada. 2005.
- & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 2006.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2006.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yudi Kristiani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.

Yunus Husein. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima. 2008.

II. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

III. Makalah dan Jurnal

Agus Budianto. *Kewenangan “Lebih” PPATK Sebagai Model Pengakuan Hukum Money Laundry*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol. 46 No. II. Juli-Desember 2012.

Agus Santoso. *Investasi, Korupsi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Kemakmuran Rakyat*. Disampaikan pada Peluncuran Corruption Perception Index 2014 (TII) Jakarta, 3 Desember 2014.

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta. 2006.
- Newsletter Komisi Hukum Nasional. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Edisi Mei 2003.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.
- Halif. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Heru Kuswanto. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, April 2010.
- Mardjono Reksodiputro. *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional. Disampaikan pada 2 Maret 2006.
- Muhammad Fadli, M, Dajfar Saidi, & Muhadar. *Tinjauan Hukum Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan*.
- Muslim, Fithriadi, & Edi Nasution. *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan tema "Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajarela" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepala Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang, bekerjasama dengan *Pro Justitia Institut Jakarta* dan *Harian Umum Singgalang* di Hotel Pangeran Beach, Padang, 19 November 2011.
- Modul E-Learning 3 : Penegakan Hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan E-Learning, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Putu Kartika Sastra, Gde Made Swardhana, & Idan Bagus Surya Darmajaya. *Mekanisme Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan dan*

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

R. Dea Rhinofa. *Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Money Laundering Hasil Tindak Pidana Narkotika. Badan Narkotika Nasional.*

Sabatini H. *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK).* Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 6, Nomor III Desember 2010.

Sumiyanto Aulia & Made Sadhi Astuti. *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang: Wacana Vol. 13 No. 4 Oktober 2010.

Supriyadi Widodo & Eddyono, dkk. *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia,* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Syarifah Tugris, Syafruddin Kalo, & Mahmud Mulyadi. *Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam UU. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Tjetjtep Saepul Hidayat, Aswanto, Ansori Ilyas. *Penerapan Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Korupsi.* Bagian Konsentrasi Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin.

Yunus Husein. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranan Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.*

-----*. Jurnal mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian*

-----*. Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligent Unit Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

-----*. Kesiapan PPATK Dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Makalah Disampaikan Pada Diskusi Internal yang Diselenggarakan BPHN di Jakarta, pada 15 September 2003.

----- . *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Perekonomian Nasional.* Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Indonesia dan Bank Mandiri.

IV. Situs dan Surat Kabar

PPATK Temukan 23 Transaksi Mencurigakan, dilansir dari Suara Pembaruan tanggal 6 Juni 2012 yang diakses tanggal 5 November 2014.

<http://www.ppatk.go.id>. Naskah Akademik UU TTPU, Diakses tanggal 1 Maret 2015.

<http://www.ppatk.go.id>. Apresiasi Dunia Untuk Indonesia, Diakses tanggal 12 Oktober 2015.

<http://www.ppatk.go.id>. Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri, Diakses tanggal 12 Oktober 2015.

